

BAB II

PENGELOLAAN PARIWISATA

A. Gambaran Pariwisata di Kota Tual

Kota Tual didirikan pada tanggal 10 Juli 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Kota Tual merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 disahkan. Kota Tual yang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kec. Pulau Dullah Utara, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kec. Tayando Tam, Kec. Pulau Kur, Kec. Kur Selatan. Kota Tual memiliki luas wilayah keseluruhan sekitar 19.088,29 km² terdiri dari luas daratan 352,66 km² (1,33%) dan luas lautan 18.736 km² serta jumlah penduduk yang mencapai 88.663 jiwa di tahun 2019,¹ dan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Maluku.

Kota tual merupakan wilayah kepulauan (*city of small*) yang terdiri dari 66 pulau, 13 pulau telah berpenghuni, dan 53 pulau tak berpenghuni, kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah dan kondisi pulau-pulau kecil dengan pantai yang indah karena dikelilingi oleh pasir putih, sehingga memiliki daya tarik pariwisata bahari yang sangat melimpah dan beragam serta potensial untuk dikembangkan. Sebagian besar obyek-obyek wisata bahari terletak di pulau-pulau

¹ Letak geografis kota tual www.tualkota.bps.go.id. Diakses tanggal 4 juli 2022

sekitar Kota Tual, sehingga membutuhkan fasilitas transportasi laut seperti speedboat dan kapal ferry penyeberangan yang tersedia.

Selain potensi wisata bahari, Kota Tual juga memiliki potensi wisata budaya, yakni beberapa peninggalan prasejarah sebagai daya tarik tersendiri karena masih terpelihara dengan baik. Dengan adanya potensi daya Tarik wisata, baik wisata bahari maupun budaya yang memiliki nilai jual yang dapat dijadikan sebagai *leading sector* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Secara astronomis, Kota Tual terletak pada koordinat: 131°-133° Bujur Timur dan 5°-6° Lintang Selatan. Sedangkan wilayah administratif pemerintahan terdiri dari lima kecamatan antara lain Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Tayando-Tam, Kecamatan Pulau Kur, dan Kecamatan Pulau Kur Selatan.²

Berdasarkan tata letak pembagian wilayah administrasi Kota Tual, terbagi kedalam lima kecamatan diantaranya Kecamatan Pulau Dullah Utara, dengan pembagian wilayah administrasi Desa Fiditan, Desa Dullah, Desa Ngadi, Desa Dullah Laut, Desa Labetawi, Desa Tamedan, dan Desa Ohoitel. Kecamatan Pulau Dullah Selatan, dengan pembagian wilayah administrasi Desa Tual, Desa Taar, Kel. Ketsoblak, Kel. Lodar-El, Kel. Masrum, Dusun Mangon, Dusun Dumar, Dusun P. Fair, Dusun P. Ut. Kecamatan Pulau Tayando-Tam, dengan pembagian wilayah administrasi Desa Yamtel, Desa Yamru, Desa Ohoiel, Desa Langgiar, Desa Tam-Ngurhir, Dusun Tam, Ohoitom. Kecamatan Pulau Kur, dengan pembagian wilayah

² Data BPS www.tualkota.bps.go.id. Diakses tanggal 4 Juli 2022

administrasi Desa Lokwirin, Desa Finualean, Desa Tubyal, Desa Sermaf, Desa Kaimear. Dan Kecamatan Pulau Kur Selatan, dengan pembagian wilayah administrasi Desa Kanara, Desa Warkar, Desa Yapas, Desa Rumoin, Desa Hirit, Desa Niela, Desa Tiflen, Dusun Fitarlor, Dusun PasirPanjang, Dusun Fadol.

1. kondisi Demografis wilayah kota tual

Berdasarkan hasil pencacahan sensus data penduduk tahun 2016, jumlah penduduk kota tual tercatat sebanyak 70.367 orang. Secara demografi jumlah penduduk berdasarkan sensus kependudukan pada pertengahan bulan juni tahun 2016 tersebar di Kecamatan Pulau Dullah Selatan 41.930 Jiwa Kecamatan Pulau Dullah Utara 16.011 Jiwa, Kecamatan Pulau Tayando Tam 6.543 jiwa dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur 5.883 jiwa. Jumlah penduduk kota tual adalah sebesar 12,7% dan kepadatan penduduk di berbagai wilayah berkisar antara 49 orang/km² – 251 orang/km². Hinga akhir tahun 2019, penduduk Kota Tual diprediksi berjumlah 88.633 jiwa³.

Tingkat kepadatan penduduk kian bertambah 15 jiwa/km² dengan perincian sebaran penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan sebaran penduduk terkecil berada di Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Penduduk asli Kota ini adalah Suku Kei, disamping orang-orang yang berasal dari daerah lain yang memilih menetap di Kota ini, seperti orang asal Jawa, Bugis dan Makassar serta Buton dan Ambon yang menetap sebagai pedagang.

2. Kondisi Topografi Wilayah Kota Tual

³ Kota Tual dalam angka 2020. www.tualkota.bps.go.id. Diakses tanggal 4 Juli 2022

Kondisi topografis Kota Tual bisa dilihat dari suatu kondisi objektif ketinggian serta kemiringan lahan. Kemiringan suatu lahan merupakan salah satu factor penting yang perlu diketahui dalam aspek topografi dengan kemiringan berkisar antara 0-8% dan 8-15% di mana pemukiman/desa umumnya berada pada wilayah dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut. Morfologi daratan pada kepulauan ini tergolong landau terutama pada daerah Pulau Ut, Tayando dan Dullah. Sedangkan karakter daratan yang cukup berbukit dapat ditemui pada Kecamatan Pulau-pulau Kur. Kota Tual termasuk wilayah yang unik karena terdiri wilayah daratan dengan memiliki pulau yang tersebar berjumlah 66 pulau kecil. Dari sekian banyak pulau tersebut, hanya 13 pulau yang berpenghuni, sedangkan pulau yang tidak berpenghuni masih sebanyak 53.

Kota Tual memiliki banyak pulau-pulau kecil yang menjadi primadona wisata. deretan pulau di Kota Tual yang sangat indah yaitu Pulau Bair. Pulau Bair ini memiliki potensi dan nilai jual ekonomi yang sangat tinggi dengan spot keindahan pesona alamnya pada sektor pariwisata. Selain itu masih terdapat lagi yaitu Pulau Duroa, Pulau Adranan, dll. Namun pada kenyatannya, kondisi infrastruktur di daerah Kepulauan masih belum bisa dijangkau dengan cara mudah. Masih banyak tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan akses menuju kepulauan yang masih belum berjalan dengan baik sampai dengan saat ini.

Pengertian Pariwisata, kata wisata secara harfiah dalam kamus berarti perjalanan dimana seseorang kembali ke tempat asalnya, perjalanan pulang-pergi

yang dilakukan untuk bisnis, berlibur, atau pendidikan, dengan mengunjungi berbagai

Istilah pariwisata baru muncul di masyarakat pada abad ke-18 setelah revolusi industri Inggris. Pariwisata berasal dari kegiatan wisata (*tour*), yakni ketika seseorang memutuskan untuk melakukan perubahan tempat tinggal sementara, di luar tempat tinggalnya sehari-hari karena alasan selain kegiatan yang menghasilkan. Pariwisata adalah suatu kegiatan, jasa atau produk hasil industri pariwisata dan dapat menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan⁴.

Pariwisata telah lama menjadi perhatian dari segi ekonomi, politik, administrasi negara, dan sosiologi, yang sampai saat ini belum ada kesepakatan akademis tentang apa itu pariwisata. Secara etimologis, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta. Sansekerta terdiri dari dua kata yaitu *Pari* dan *wisata*. *Pari* berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan *Wisata* berarti “pergi” atau “perjalanan”⁵. Menurut Yoeti (2003), suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata jika : (1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain diluar tempat tinggal seseorang yang melakukan perjalanan; (2) Tujuan perjalanan hanyalah untuk bersenang-senang, bukan untuk mencari nafkah ditempat atau negara yang dikunjunginya; (3) Hanya sebagai konsumen dari tempat yang dikunjungi.⁶

⁴ Muljadi A J. **Kepariwisata & Perjalanan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Jakarta, hal.15

⁵ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja. **Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata**, Pustaka Larasan, Denpasar, 2017, hal.15

⁶ Febriyanti Gamtohe dkk.”Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana dalam Pengembangan Kawasan Wisata Bahari di Pulau Maitara Kota Tidore Kepulauan”, *Jurnal Spasial dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019, hal.582

Berdasarkan hal tersebut, kata pariwisata harus diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan sebutan “*tour*” dalam bahasa Inggris, sedangkan untuk pengertian jamaknya, kata “kepariwisataan” dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*” (Youeti, 1996:112)⁷.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan dengan tujuan berlibur. Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini digunakan sebagai pengganti kata *Turisme* sebelum kata pariwisata diadopsi dari bahasa Sansekerta.

Salah satu hal yang menonjol dari batasan-batasan yang dijelaskan sebelumnya adalah bahwa pada dasarnya, apa yang menjadi ciri dari perjalanan pariwisata itu adalah sama (walaupun cara mengemukakannya sedikit berbeda), sehingga ada beberapa faktor penting tentang pariwisata seperti :

1. Perjalanan hanya dilakukan untuk sementara waktu
2. Perjalanan berlangsung dari suatu tempat ke tempat lain
3. Perjalanan; dalam bentuk apapun, harus selalu dikaitkan dengan suatu perjalanan atau rekreasi
4. Seorang wisatawan tidak mencari nafkah di tempat yang mereka kunjungi tetapi sekedar menjadi konsumen di tempat tersebut.

Kepariwisataan sendiri merupakan pengertian jamak yang didefinisikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, dalam bahasa Inggris disebut *tourism*. Kegiatan pariwisata ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan obyek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah

⁷ *Ibid.*

kepariwisataan, termuat di dalam Bab I Pasal I Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang yang mengunjungi suatu tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, atau pengembangan diri;
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha yang timbul dari akibat adanya interaksi.
5. Daya Tarik wisata adalah suatu daya tarik yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan seorang wisatawan
6. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif dimana tempat wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang saling terkait serta melengkapi terwujudnya kepariwisataan
7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk atau barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
8. Pengusaha pariwisata adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
9. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang berkaitan sebagai penghasil barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
10. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata yang mempengaruhi dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya pelestarian lingkungan, serta pertahanan dan keamanan⁸.

⁸ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja , *op.cit.*, hal.15-18

B. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Tanpa Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata

Pengelola dan pemilik destinasi wisata di sektor pariwisata mengedepankan keindahan dari panorama destinasi wisata untuk kepuasan wisatawan dalam kegiatan berwisata. Untuk mencapai kepuasan wisatawan, pihak pengelola diharapkan memperhatikan kualitas pengelolaan yang sesuai dengan harapan dari bisnis *hospitality*. Selain itu, pihak pengelola dituntut bisa menjalin relasi sosial untuk bisa mengawal dan mengadaptasi dari kebijakan program-program pembangunan pariwisata untuk bentuk pengelolaan destinasi wisata yang lebih

konformis dan strategis untuk kepuasan dari tingkat kunjungan wisatawan. Sejalan dengan peranan pengelola destinasi wisata, pemilik destinasi wisata diharapkan peduli dengan nasib para pengelola destinasi wisata, keadaan destinasi wisata dan mau memberikan dukungan penuh dari segi modal usaha untuk pemeliharaan atau pengembangan destinasi wisata.

Perubahan sikap kolektif merupakan sebuah stimulan bagi perkembangan daerah tujuan wisata. Perkembangan daerah tujuan wisata dapat dikatakan berubah secara evolusi, apabila perkembangan daerah tujuan wisata melalui beberapa periode tertentu seperti fase eksplorasi, keterlibatan, pembangunan, konsolidasi dan stagnasi. Pada fase eksplorasi, keberadaan daerah tujuan wisata masih tergolong alami dan produk wisata belum sepenuhnya diproduksi mempergunakan teknologi modern. Aksesabilitas untuk mencapai daerah tujuan wisata masih sangat sedikit dan tidak memenuhi syarat untuk kunjungan wisatawan dalam jumlah besar. Tipikal wisatawan yang paling sering berkunjung yaitu *adventure* atau *explorer tourist*. Dimana keberadaan dukungan sarana akomodasi wisata masih belum memadai, belum lengkap dan jumlahnya sangat terbatas tidak menjadi masalah besar bagi mereka. Para wisatawan dapat menikmati fasilitas dan produk-produk wisata dengan biaya sangat terjangkau. Seringkali wisatawan tidak mendapatkan fasilitas yang sama seperti di daerah asal mereka, dimana rumah-rumah penduduk menjadi pilihan yang tergolong laris diantara pilihan akomodasi wisata. Kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata pada tahap eksplorasi didominasi oleh kunjungan wisatawan tanpa melalui biro perjalanan wisata. Interaksi wisata lumrah dilakukan wisatawan secara langsung

dengan masyarakat disekitar obyek wisata. Penggunaan Bahasa '*pidgin language*', bahasa asing dengan dialek lokal terbilang sering ditemui dalam interaksi wisata. Keberadaan daerah tujuan wisata pada fase eksplorasi belum mempergunakan proses promosi yang terorganisasi secara baik. Sistem promosi yang dipergunakan sangat bergantung pada promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*). Dimana bagi wisatawan yang mendapatkan pengalaman menarik secara langsung di suatu daerah tujuan wisata akan menceritakan kepada saudara dan kerabatnya sehingga mereka tertarik dan antusias menjadi *walk in guest* terkait objek wisata tersebut. Selangkah lebih maju dari fase eksplorasi dikenal dengan fase involvement. Fase involvement ditandai dengan tingkat keterlibatan dari masyarakat lokal cukup besar untuk kegiatan pariwisata. Dimana kedatangan wisatawan lebih dipandang sebagai peluang pariwisata. Dalam meraih peluang pariwisata tidak sedikit beragam toko, warung dan kerajinan dikomodifikasi masyarakat pelaku dari properti sosial budaya mereka. Regulasi peraturan pemerintah untuk legalitas kegiatan pariwisata mulai dianggap kondusif oleh masyarakat untuk harmonisasi kegiatan pariwisata sekaligus sebagai bentuk jaminan yang memotivasi mereka selaku para pelaku wisata untuk mencapai *guest satisfaction*. Pencapaian *guest satisfaction* mendapatkan perhatian lebih serius dari para pelaku wisata pada fase development. Beragam keluhan dari wisatawan tampak direspon melalui pergerakan dalam kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik sebagai solusi yang sering kali ditempuh para pelaku wisata untuk mencapai *guest satisfaction*. Pelatihan dan pengembangan keterampilan dari para pelaku wisata pada fase development terus digiatkan seiring dengan usaha renovasi dan

pembangunan fisik berupa hotel, villa, restaurant, biro perjalanan, obyek wisata serta fasilitas umum yang semakin lengkap dan bonafit untuk pengembangan daya tampung dan daya dukung demi kepuasan wisatawan. Demi mencapai kepuasan wisatawan, tidak sedikit dari para pelaku wisata pada fase development berupaya pula mengembangkan dan membina jaringan sosialnya pada organisasi-organisasi kepariwisataan seperti UNWTO, ASITA, HPI dan PHRI untuk optimalisasi pengembangan daya tampung dan daya dukung usaha kegiatan wisata serta memecahkan masalah-masalah besar pengelolaan destinasi kepariwisataan. Peranan paket wisata baru dari pihak travel agen atas bentuk suasana obyek wisata dan akomodasi wisata pada fase pembangunan dianggap sangat membantu dalam mempertahankan dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Tantangannya, terletak pada mempertahankan kualitas pelayanan ditengah dinamika sosial. Dalam rangka mempertahankan kualitas produk dan pelayanan, para pelaku wisata melangkah lebih maju menuju fase konsolidasi. Dimana pada fase konsolidasi, para pelaku wisata lebih banyak mempertahankan kualitas produk atau jasa, menjaga relasi sosial dibidang pariwisata dan pencitraan untuk usaha peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Adapun upaya signifikan dilakukan dalam berbagai bentuk kerjasama bilateral dan multilateral agendanya lebih kepada menangani masalah kecil dan persoalan hambatan kegiatan pariwisata yang dianggap merugikan pelaku wisata seperti akibat *travel advisory*, *travel warning* dan *travel banned* melalui konsolidasi nasional dan internasional. Upaya itu secara prinsip dilakukan untuk meraih bentuk konformitas untuk stabilitas kegiatan usaha di bidang pariwisata pada

fase konsolidasi. Stabilitas usaha pariwisata merupakan indikasi dari kemampuan kegiatan dibidang pariwisata. Stabilitas usaha bisa dipengaruhi oleh soliditas atau kekompakan dari jaringan sosial, sarana serta kesiapan pelaku dalam memenuhi permintaan wisata. Stabilitas usaha bersambut dengan kunjungan wisatawan yang berkesinambungan menunjukkan tahap stagnasi pada proses evolusi. Kondisi ini dipertahankan tidak lepas dari jumlah kunjungan wisatawan yang bisa terkategori konstan. Dimana tidak ada perubahan yang diupayakan, semua program dan sistem usaha dapat dikatakan sudah cukup berjalan sesuai dengan perencanaan dan harapan para pemilik modal pariwisata walaupun kunjungan wisata didominasi oleh *repeated visit tourists*. Pada fase stagnasi, dapat terbilang langka ditemukan usaha signifikan untuk pembinaan maupun pengembangan usaha pariwisata. Fase stagnasi ini dapat disebut sebagai fase puncak kecukupan para pelaku wisata terkait pengelolaan daerah tujuan wisata dalam proses evolusi sosial. Secara evolutif, arah perubahan teknis pengelolaan daerah tujuan wisata berkembang kepada pusat kemajuan dan kemampuan. Dapat disimak bahwa proses evolusi sosial semacam itu bersifat pro-pembangunan pariwisata.

Pengelolaan Destinasi Pariwisata telah menjadi *grand issue* dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah Kota Tual sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018 – 2023). Sistem pengelolaan destinasi pariwisata di Kota Tual bertumpu pada prinsip Pantahelix yang melibatkan unsur Perguruan Tinggi, NGO, Komunitas pariwisata, media dan

masyarakat umum secara kolaboratif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas

Pariwisata dalam pengelolaan Destinasi antara lain :

- Mendorong perbaikan dan peningkatan jaringan atraksi, amenities dan aksesibilitas wisata di lokasi destinasi.
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola Destinasi yang terampil, mandiri dan inovatif melalui kegiatan-kegiatan pelatihan tata Kelola destinasi dan sosialisai sadar wisata secara terus menerus.
- Menumbuhkan hubungan kemitraan dengan pihak lain guna terciptanya iklim ekonomi yang kondusif di semua sektor pariwisata.

Kota Tual memiliki potensi alam dan budaya yang sangat berlimpah. Hal ini terlihat dari hampir setiap Desa terdapat potensi wisata baik bahari, budaya maupun ekowisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata terus melakukan pembenahan terhadap potensi-potensi tersebut baik dari ketersediaan infrastruktur, kapasitas SDM dan membangun relasi dengan pihak lain dalam rangka pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Secara garis besar, Kota Tual memiliki potensi pariwisata alam bahari sebagai akibat dari letak geografis yang berbasis gugus pulau dan potensi pariwisata budaya sebagai jejak leluhur yang masih melembaga dalam tradisi kehidupan masyarakat lokal beserta situs situs peninggalan masa lalu yang masih terawat. Sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata, tentu terdapat dampak terhadap retribusi pajak penghasilan. Pemerintah Daerah Kota Tual sejauh ini belum menyelenggarakan sistem retribusi sebagai elemen pendapatan daerah. Mengingat Pemerintah Daerah masih terus membangun koordinasi dan fasilitasi beberapa Ranperda termasuk tentang operasional retribusi di sektor pariwisata.

Pengelolaan Pariwisata di Kota Tual hingga saat ini belum memiliki belum ada regulasi yang teknis mengatur kepariwisataan, sehingga sejauh ini pemerintah daerah masih bertumpu pada PERDA Nomor 02 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023 dan dengan melakukan sinkronisasi dengan Permenparekraf Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan dan Permenparekraf Nomor 04 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi pariwisata di Kota Tual dalam hal ini pemda masih terus melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka penyediaan infrastruktur dan fasilitas pariwisata di kawasan destinasi sambil menyiapkan kapasitas SDM pengelola yang terampil dan inovatif. Pemerintah Daerah pun telah melakukan kerjasama dengan Pusat Studi Pariwisata UGM dalam hal penyusunan RIPPDA agar menjadi dokumen panduan dalam penyelenggaraan pariwisata daerah Kota Tual. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, Pariwisata Kota Tual mulai terlihat berkembang. Hal ini ditandai dengan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan desa wisata sebagai kawasan destinasi terpadu. Selain itu, Pemerintah Daerah sedang melakukan fasilitasi penyediaan dan peningkatan atraksi wisata, pembangunan amenities wisata dan aksesibilitas sebagai sarana kebutuhan bagi wisatawan.

Kota Tual memiliki salah satu spot wisata yang cukup populer dikalangan wisatawan, yang sering dikatakan mirip dengan pulau Raja Ampat yang terletak di Papua Barat sehingga sering disebut pulau mininya Raja Ampat oleh warga serta masyarakat sekitar, pulau yang dimaksud ialah pulau Bair. Pulau Bair merupakan

salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kepulauan Kei. Pulau Bair tak berpenghuni, namun memiliki pemandangan yang menakjubkan. Salah satu daya tarik yang diminati dari pulau ini yaitu air laut yang berwarna hijau kebiruan yang tentunya akan memanjakan mata setiap orang yang berkunjung ke Pulau Bair. Akan tetapi, Pulau Bair termasuk salah satu destinasi yang hak kepemilikannya masih berada pada wilayah petuanan masyarakat Desa sehingga peran Dinas Pariwisata terhadap pengelolaan Pulau Bair masih belum optimal. Sehingga, Pengelolaan Pulau Bair oleh Pemerintah Daerah masih terbatas pada pembenahan kapasitas SDM pengelola karena mengingat status hukum Pulau Bair sementara dalam penguasaan pihak swasta lewat proses penyewaan oleh masyarakat sekitar beberapa tahun yang lalu. Langkah yang sementara diambil oleh Dinas Pariwisata adalah membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak masyarakat desa dan pihak swasta agar Pulau Bair kembali dikelola secara bersama.

Tercatat 28 destinasi wisata baik yang bersifat potensial maupun aktif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tual antara lain :

- Pantai Difur, Desa Labetawi
- Pantai Lupus, Desa Labetawi
- Pantai Namser, Desa Dullah
- Pantai Nam Indah, Desa Ohoitahit
- Wakat Park, Desa Ohoitahit
- Kuliner Sorbat, Desa Tamedan
- Pulau Bair, Desa Dullah Laut
- Pulau Adranan, Desa Dullah Laut
- Pantai Duroa, Desa Dullah Laut
- Danau Tahitko, Desa Dullah Laut
- Danau Waren, Desa Ngadi
- Danau Fanil, Desa Ohoitel
- Fid Bangir, Desa Taar
- Pulau UT, Desa Tual

- Pulau Varatneu, Desa Yamtel-Tayando
- Pulau Reeyanat, Desa Tam Ngurhir
- Pantai Heniar, Desa Yamtel - Tayando
- Goa Tengkorak Kepala Tujuh, Desa Yamtel - Tayando
- Pantai Kuber, Desa Yamru
- Masjid Tua, Desa Yamru - Tayando
- Goa Batu Kapal, Desa Yamru - Tayando
- Batu Timbul, Desa Yamru - Tayando
- Pulau Bui, Desa Kaimear - PP Kur
- Pantai Werajo, Desa Lokwirin - PP Kur
- Pantai Namaselap, Desa Sermaf - PP Kur
- Telaga Werwari, Desa Hirit - P. Kur Selatan
- Mangur Island, Desa Mangur - P. Kur Selatan

Terkait peraturan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPDA) saat ini belum ditetapkan sehingga Pemerintah Daerah masih terus berupaya untuk menyediakan payung hukum lewat Ranperda Pariwisata yakni Ranperda Retribusi Pariwisata dan Ranperda Desa Wisata. Sementara itu, Ranperda mengenai pengelolaan aset daerah di tempat wisata sementara dalam penyusunan dan Ranperda tentang RIPPDA telah diajukan ke DPRD untuk mendapatkan penetapan. Pemerintah Daerah masih terus melakukan koordinasi untuk menyiapkan Ranperda tentang Pariwisata, Hingga saat ini, terdapat 1 Ranperda yang sudah selesai penyusunan, sisa 2 buah Ranperda yang sementara dalam tahap penyusunan. Alternatif yang digunakan oleh pemda Kota Tual masih tetap mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah sebagai dokumen pelaksanaan yang berisi arah dan kebijakan pembangunan daerah termasuk Pariwisata, selain itu masih tetap melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Permenparekraf yang relevan fungsi dan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil perolehan data yang diperoleh dari Bapak Ibnu Salim Oat, SH. (Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata) terkait pengelolaan pariwisata Kota Tual kedepan Ibnu mengatakan, “langkah yang akan diambil oleh Dinas Pariwisata ialah Pembinaan SDM pengelola destinasi melalui pembentukan kelembagaan, perbaikan atraksi wisata, membangun fasilitas di kawasan destinasi, peningkatan pelayanan, meningkatkan promosi wisata melalui sarana digital, menyelenggarakan event/festival di lokasi destinasi, menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan mengikutsertakan pengelola destinasi”. Ia juga menambahkan, “Sambil menunggu regulasi mengenai dasar pungutan/retribusi di sektor pariwisata, Dinas Pariwisata menggunakan prinsip perjanjian kerjasama melalui MOU dengan pihak desa/pengelola dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan”.

Menurut Ibnu, “Kendala utama dalam pengelolaan destinasi wisata di Kota Tual adalah kesadaran wisata yang masih relatif rendah oleh warga desa di kawasan destinasi. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas persoalan yang ada di desa sehingga berdampak secara menyeluruh ke segala aspek. Pemerintah daerah Kota Tual sejauh ini telah melakukan pendekatan dengan memfasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata melalui intervensi dana desa dengan tujuan untuk menumbuhkan iklim kepariwisataan melalui gerakan sadar wisata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar”⁹.

⁹ Perolehan Data oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Tual, 3 Juli 2022, pukul 10.25 WIT, Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.